

KEARIFAN LOKAL MESTI DILESTARIKAN!

Oleh: Sumaryadi

Pendahuluan

Di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat (Minggu Pahing, 18 Juli 2010/6 Ruwah 1943, halaman 11) tertayang sebuah judul berita yang menarik “Globalisasi, Nilai Budaya Lokal Kian Luntur”. Pada intinya, dalam tulisan itu diwacanakan bahwa globalisasi dapat diibaratkan sebagai dua mata pisau. Di satu sisi, globalisasi telah banyak memberikan capaian di berbagai bidang. Tetapi, di sisi lain, globalisasi juga memarginalkan kebudayaan bangsa-bangsa Timur. Nilai-nilai lokal menjadi semakin luntur. Namun sebaliknya, budaya populer merajalela di masyarakat. Walhasil, pembentukan karakter *nation* pun menjadi teramat rumit.

Pada konteks itu, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam IX, dalam sambutan tertulisnya (yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Djoko Dwianto, M.Hum.) menegaskan bahwa salah satu kerugian penting yang sering kurang disadari tatkala sebuah bangsa memasuki globalisasi adalah kelalaian menjaga dan memelihara kekayaan budayanya sendiri.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Perhimpunan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Jawa, Ir. H. Yuwono Sri Suwito, M.M. (salah satu narasumber), menyatakan dengan tegas bahwa globalisasi dikhawatirkan akan membawa pergeseran sifat karakteristik dan pekerti bangsa. Khususnya, untuk masyarakat Jawa yang dikenal mempunyai toleransi keagamaan dan lebih menekankan aspek kerukunan. Kearifan lokal di Yogyakarta pada hakekatnya terkandung dalam nilai-nilai budaya Jawa – Yogyakarta.

Isu Globalisasi

Sejak isu globalisasi mencuat dari Benua Utara -- Eropa Barat dan Amerika Serikat -- globalisasi telah membuat batas-batas dunia semakin cair. Yang terjadi kemudian adalah terbukanya perluasan lahan bagi produk-produk budaya Barat ke negara-negara berkembang. Tetapi, ternyata teramat sulit untuk hal yang sebaliknya. Indonesia, negeri kita tercinta, tidak akan lebih daripada pasar yang harus mau menyerap produk-produk Barat. Cukup sulit bangsa-bangsa di negara berkembang

(apalagi yang lebih berpredikat terbelakang) untuk melakukan negosiasi, karena hampir semua modal, sumber daya manusia, akses dan teknologi, dan pusat-pusat informasi 'dikuasai' oleh negara-negara Barat.

Memang harus diakui bahwa tidak semua yang berasal dari budaya Barat itu tidak baik. Sebaliknya, tidak semua yang ada pada budaya sendiri itu baik untuk selamanya. Kebaikan dan ketidakbaikan selalu ada di mana-mana. Hanya saja, *kasunyatan* lebih mengatakan bahwa arus budaya yang datang dari Barat itu demikian kuatnya menghantam budaya lokal. Sehingga, sangat mungkin budaya lokal tersebut akan mati secara mengenaskan. Ironisnya, dan ini yang membuat kita prihatin, betapa bangsa ini selalu terperangah atau terkagum-kagum dengan apa yang dikatakan oleh 'bule' *ketimbang* apa yang digagas oleh bangsa sendiri. Termasuk dalam hal ini, tidak percaya terhadap produk ideologi Pancasila milik sendiri yang tidak kalah briliannya dibanding dengan ideologi para 'bule' itu.

Betapapun, globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi.

Sekilas tentang Kebudayaan

Dalam konteks ini, yang dimaksud budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Atau, dapat juga dikatakan, bahwa kebudayaan adalah suatu alat (media) yang digunakan oleh manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan (baik alam maupun sosial). Yang disebut kebudayaan selalu dibuat oleh manusia (: *man made*). Kenyataan juga menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat dan kebudayaan dapat digambarkan sebagai '*Society is the vehicle of culture*'.

Di dalam kehidupan berkebudayaan sangat dimungkinkan akan terjadinya akulturasi budaya, asosiasi budaya, dan degradasi budaya. Hal itu tidak dapat dipungkiri. Untuk dua hal yang pertama, mungkin kita tidak perlu risau, karena kapanpun dan di manapun, *jamak*-nya memang demikian. Dan, bisa berdampak lebih memperkaya dan memper-'cantik' budaya tersebut. Tetapi, untuk yang ketiga atau yang terakhir, kalau sampai itu terjadi, bahkan menjadi 'pemandangan' umum di mana-mana, bersimharajalela, 'tamatlah riwayat' bangsa itu, karena kehilangan jatidiri. Yang pasti, peristiwa itu dapat saja menyangkut ketiga wujud budaya yang ada, yakni wujud budaya *ideas* yang akan melahirkan 'sistem budaya atau adat istiadat'; wujud budaya *activities* yang akan menghasilkan 'sistem sosial'; dan wujud budaya *artifact* yang akan menghasilkan kebudayaan fisik.

Apapun yang terjadi, yang selalu harus diingat, bahwa kebudayaan merupakan bagian yang fundamental dari setiap orang dan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang tujuan akhirnya diarahkan bagi kepentingan manusia harus memiliki dimensi kebudayaan. Kongres Kebudayaan (1991) berbunyi 'Pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia dalam segala perwujudannya menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab itu hendaknya dapat terwujud dalam peningkatan peran serta masyarakat guna memajukan kebudayaan bangsa melalui berbagai cara dan wahana yang tersedia'. Hal itu mengisyaratkan bahwa kebudayaan Indonesia harus tetap dipelihara agar bisa dikembangkan dan pengembangannya ditujukan untuk kemanfaatan masyarakat. Konsekuensi dari itu tidak ada lain kecuali mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya penyelamatan dan pelestarian warisan budaya.

Pemikiran di atas sudah seharusnya menjadi komitmen segenap warga Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur, dari kawasan utara sampai kawasan selatan. Maka, tidak mustahil jika UUD 1945 pasal 32 pun menegaskan, 'Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia'. Dalam hal ini, kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha dari budi daya rakyat Indonesia. Kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah-daerah di seluruh Indonesia diakui sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus ditujukan ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang justru akan dapat memperkembangkan

atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Kearifan Lokal dan Upaya untuknya

Kearifan lokal (*local genuine*) merupakan bagian dari konstruksi budaya. Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan merupakan elemen penting untuk memperkuat kohesi sosial di antara warga masyarakat. Kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jatidiri bangsa secara nasional. Kearifan lokal itulah yang membuat suatu budaya bangsa memiliki akar.

Sesungguhnya, kearifan lokal adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat lokal di daerah tertentu yang merupakan ciri keaslian dan kekhasan daerah tersebut tanpa adanya pengaruh atau unsur campuran dari daerah lainnya. Maka, secara umum, kearifan lokal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *pertama*, kearifan lokal yang dapat dilihat dengan mata (*tangible*), misalnya objek-objek budaya, warisan budaya bersejarah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan; dan *kedua*, kearifan lokal yang tidak dapat dilihat dengan mata (*intangible*), berupa nilai atau makna dari suatu objek atau kegiatan budaya.

Kearifan lokal merupakan usaha untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada fakta-fakta atau gejala-gejala yang berlaku secara spesifik dalam sebuah budaya masyarakat tertentu. Untuk itu, secara umum, kearifan lokal memiliki ciri dan fungsi sebagai berikut. (1) Sebagai penanda identitas sebuah komunitas. (2) Sebagai elemen perekat kohesi sosial. (3) Sebagai unsur budaya yang tumbuh dari bawah, eksis, dan berkembang dalam masyarakat, bukan unsur budaya yang dipaksakan dari atas. (4) Berfungsi memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. (5) Dapat mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas *common ground*. (6) Mampu mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, dan mekanisme bersama untuk mempertahankan diri dari kemungkinan terjadinya gangguan atau perusakan solidaritas kelompok sebagai komunitas yang utuh dan terintegrasi.

Kearifan lokal atau yang sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Di satu sisi,

wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Maka, *wisdom* sering diartikan sebagai 'kearifan/kebijaksanaan'.

Di sisi lain, *local* menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antarmanusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut *setting*. *Setting* adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan bersemuka (*face to face*) dalam lingkungannya. Sebuah *setting* kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan ketika mereka berhubungan satu dengan yang lain, atau menjadi acuan ketika mereka bertingkah laku.

Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal ternyata juga dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Kearifan-kearifan lokal (*local genius*) pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jati diri bangsa secara nasional. Kearifan-kearifan lokal itulah yang membuat suatu budaya bangsa memiliki akar. Budaya etnik lokal seringkali berfungsi sebagai sumber atau acuan bagi penciptaan-penciptaan baru, misalnya dalam bahasa, seni, tata masyarakat, teknologi, dan sebagainya, yang kemudian ditampilkan dalam perikehidupan lintas budaya.

Motivasi menggali kearifan lokal sebagai isu sentral secara umum adalah untuk mencari dan akhirnya, jika dikehendaki, menetapkan identitas bangsa, yang mungkin hilang karena proses persilangan dialektis atau karena akulturasi dan transformasi yang telah, sedang, dan akan terus terjadi sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Bagi kita, upaya menemukan identitas bangsa yang baru atas dasar kearifan lokal merupakan hal yang penting demi penyatuan budaya bangsa di atas dasar identitas daerah-daerah Nusantara.

Pengembangan kearifan lokal yang relevan dan kontekstual memiliki arti penting bagi berkembangnya suatu bangsa, terutama jika dilihat dari sudut ketahanan budaya, di samping juga mempunyai arti penting bagi identitas daerah itu sendiri. Pengembangan kearifan lokal suatu daerah akan mendorong rasa kebanggaan akan budayanya dan sekaligus bangga terhadap daerahnya karena telah berperan serta dalam menyumbang pembangunan budaya bangsa. Karya-karya seni budaya, yang digali dan sumber-sumber lokal, jika ditampilkan dalam "wajah atau wacana keindonesiaan" niscaya memiliki sumbangan yang sangat besar bagi terciptanya identitas baru keseluruhan bagi bangsa secara keseluruhan.

Upaya Pelestarian Kearifan Lokal

Kearifan lokal yang terkandung dalam sistem seluruh budaya daerah atau etnis yang sudah lama hidup dan berkembang merupakan unsur budaya bangsa yang harus dipelihara dan diupayakan untuk diintegrasikan menjadi budaya baru bangsa sendiri secara keseluruhan. Dalam hal kepemilikan bahasa daerah, sebagai satu contoh soal saja, ada kekhawatiran kita bahwa per dasawarsa yang akan datang, generasi (muda) kita sudah jauh, bahkan tidak mengenal lagi bahasa (daerahnya) sendiri. Para *winasis* sudah bisa membaca gelagat akan terjadi '*wong Jawa wis ilang Jawane*'.

Demikian halnya, terhadap aspek-aspek budaya sendiri yang lain – nilai-nilai lokal, kearifan lokal – bisa jadi akan semakin terdistorsi. Hal yang demikian itu mau tidak mau akan melemahkan, bahkan sangat mungkin akan menghancurkan ketahanan budaya kita sendiri. Maka, sosialisasi penerapan nilai-nilai budaya, sebut saja persoalan etos kerja, nilai-nilai sosial (seperti kegotongroyongan), dan rasa serta sikap 'senasib-seperjuangan-sepenanggungan' adalah sesuatu yang teramat urgens dan signifikan segera dilakukan.

Terhadap masuknya budaya 'asing', tentu saja kita tidak akan berdiam diri saja. Kita melakukan seleksi atas muatan-muatan di dalamnya. Muatan yang 'kurang atau tidak pas' tentu tidak kita ambil, karena itu akan berdampak merusak. Sedangkan muatan-muatan yang positif atau justru prospektif, kita terima dengan tangan terbuka, karena itu akan memperkaya dan memperindah. Kemudian, untuk yang kedua, yang harus kita lakukan adalah mendekatkan kembali mereka ('masyarakat lokal') dengan nilai-nilai lokal yang telah teruji nilainya cukup positif dan strategis.

Terkait dengan semua itu, paling tidak ada dua hal yang mesti dilakukan. *Pertama* (sebut saja upaya eksternal), bangsa ini mesti menyikapi secara arif budaya ‘asing’ yang mau masuk. *Kedua* (sebut saja upaya internal), bangsa ini perlu mengangkat kembali nilai-nilai lokal ke permukaan, tentu dengan proses revitalisasi, transformasi, dan kontekstualisasi.

Yang mesti kemudian terjadi, muatan budaya ‘luar’ tidak dibenturkan dengan muatan budaya lokal, atau pun sebaliknya. Demikian juga, budaya ‘luar’ tidak dibiarkan menggusur budaya lokal yang bisa berakibat budaya lokal menjadi termarginalkan, yang bisa berakibat kita menjadi ‘tamu’ di rumah sendiri. Keduanya harus diberi ruang untuk bersinergi. Dengan kata lain, keduanya diposisikan secara komplementer. Dengan itu, keberadaan masyarakat lokal justru akan semakin mantap.

Memang benar, lewat berbagai forum atau tulisan kita tahu bahwa terkait dengan proses pembudayaan atas anak-cucu kita, kita punya tiga pilar pendidikan, yaitu pilar keluarga, pilar sekolah, dan pilar masyarakat. Pertanyaannya, masihkah ketiga pilar itu dapat diandalkan? *Pilar pertama*, keluarga. Harapannya, pendidikan di lingkungan keluarga bisa selalu berlangsung kondusif. Kenyataannya, makin hari semakin banyak orang tua yang kurang peduli terhadap anak-anaknya. Dengan dalih sibuk, para ibu merelakan anaknya berstatus ‘anak sapi’ atau ‘anak pembantu’. Karena alasan capek, banyak orang tua tidak lagi sempat ‘bergumul’ dengan anak-anaknya, tak ada lagi waktu untuk ‘dongeng sebelum *bobo*’, padahal momen itu teramat strategis untuk penanaman nilai-nilai kepada generasi penerus. Yang terjadi, justru anak-anak kita dinabobokan oleh berbagai kemudahan (*two in one, three in one, four in one, five in one, dst.*) yang -- sadar atau tidak -- akan berdampak terbentuknya generasi *instant*. Pun, banyak pula orang tua yang tega menyerahkan pendidikan anak kepada televisi (yang notabena sebagian besar tayangannya kurang mendidik). Berbagai tayangan dikemas dengan *setting* lokal, ternyata isinya adopsi atau pemaksaan unsur-unsur dari luar yang kurang sesuai dengan nilai-nilai kita.

Pilar kedua, sekolah. Harapannya, proses pendidikan/pembelajaran di sekolah selalu berjalan kondusif. Kenyataannya, untuk persoalan pendidikan karakter saja, betapa naifnya jika ‘pihak yang berwajib’ menerjemahkannya hanya sebagai mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Memang, pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas adalah wujud pendidikan karakter. Tetapi, pendidikan karakter tidak hanya bermakna sesederhana itu. Bagaimana setiap guru/pendidik di sekolah secara kreatif dan inovatif selalu menggalitemukan aroma

penanaman nilai-nilai luhur (agamis maupun kultural) pada bidang ampunan masing-masing. Belum lagi, pendidikan karakter di sekolah tampaknya baru berupa wacana, itu pun masih simpang-siur pemahamannya. Sementara, urgensinya sudah tidak boleh ditawar-tawar lagi. Pertanyaan yang juga muncul, terbiasakah para guru/pendidik selalu berpikir, bersikap, dan bertindak kreatif dan inovatif?

Pilar ketiga, masyarakat. Harapannya, proses pendidikan di lingkungan masyarakat kondusif. Kenyataannya, betapa masyarakat kita banyak menyediakan menu-menu yang kontra produktif, yang kontra prestatif. Kemasan yang menarik tidak lebih dari demonstrasi-demonstrasi yang tidak jelas, tawuran massal, amuk massa, penyelesaian persoalan secara anarkhis, perusakan-penghancuran fasilitas publik, pemaksaan kehendak, korupsi yang merajalela, sistem peradilan yang 'masih harus diadili', penyalahgunaan wewenang/kekuasaan, penyalahgunaan obat terlarang, perampokan, pembunuhan, mutilasi, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan seterusnya.

Dari *kasunyatan* itu, *pe-er* kita adalah upaya agar (1) keluarga adalah lingkungan pertama yang strategis dan kondusif bagi penanaman nilai-nilai; (2) sekolah adalah juga lingkungan yang strategis dan kondusif bagi penciptaan iklim berbudi pekerti dan berkarakter, cerdas yang berkarakter; (3) masyarakat adalah lingkungan yang strategis dan kondusif untuk penanaman nilai-nilai. Ujungnya, generasi yang kita miliki adalah generasi yang memiliki ketahanan budaya, karakter, jatidiri, dan hati nurani. Persoalan bagaimana caranya, itulah *pe-er* dari *pe-er* kita.

Ide untuk melestarikan kearifan lokal juga telah dijabarkan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Ada tiga unsur utama yang harus dilestarikan keberadaannya, yakni alam, sosial-budaya, dan ekonomi. Tujuan utama untuk itu adalah menjamin keberlangsungan dan keberadaan kearifan lokal agar generasi terdahulu, sekarang, dan yang akan datang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati kearifan lokal yang ada. Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan industri pariwisata di suatu daerah, misalnya, kearifan lokal sering dimodifikasi dan dicampur dengan unsur lain-lain. Bahkan, yang lebih tragis lagi diperjualbelikan untuk kepentingan kegiatan prekonomian. Ancaman terhadap kepunahan aset yang berharga tinggi ini semakin besar jika pemerintah, pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi tergiur dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh sehubungan dengan pemanfaatan kearifan lokal yang dimiliki tersebut.

Mengingat pentingnya pelestarian terhadap *local genuine* yang dimiliki masyarakat, kebijakan yang dilakukan oleh (Pemerintah) Bali layak dicermati sebagai contoh soal. Pihak-pihak terkait di Bali, khususnya masyarakat lokal, peneliti, dan pemerintah bahu-membahu melakukan usaha-usaha yang bertujuan mengidentifikasi, menentukan, dan memutuskan hal-hal yang dikategorikan sebagai *local genuine* Bali. Masyarakat lokal harus secara aktif memberikan informasi kepada para peneliti tentang kearifan lokal yang ada di daerahnya. Peneliti bertugas diminta mendata semua kearifan lokal yang ada di seluruh pelosok pulau Bali, selanjutnya ditulis dalam bentuk kajian atau penelitian ilmiah. Pemerintah membuat ketetapan tentang jenis-jenis kearifan lokal yang dimiliki Bali dan selanjutnya membuat peraturan daerah yang mengatur pelestarian kearifan lokal yang telah digali oleh para peneliti.

Dengan adanya peraturan daerah tersebut, semua kearifan lokal dapat dipreservasi -- dikondisikan sebagaimana bentuk aslinya, direvitalisasi -- penggalan kearifan lokal yang hampir punah, selanjutnya dibangkitkan kembali, sehingga kearifan lokal tersebut dikenal kembali dan dilestarikan -- pelestarian yang dinamis yang mengikuti perkembangan zaman dan perubahan, namun intinya masih terpelihara dengan baik sampai dengan generasi yang akan datang.

Penutup

Globalisasi, era global, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, pasti sampai juga di Indonesia. Kehadirannya tentu membawa ide-ide penting, ilmu pengetahuan, nilai-nilai budaya, norma hidup, dan seterusnya, baik yang bernilai positif maupun yang berdampak negatif. Yang negatif pasti tidak diambil, sementara yang positif harus diterima. Selanjutnya, itu dipertemukan dengan nilai-nilai lokal yang juga positif dalam mekanisme saling melengkapi (komplementer).

Akhirnya, ajakan dari berbagai pihak yang menyadarkan kita akan pentingnya upaya penyelamatan dan pelestarian warisan budaya lokal yang ada, sepantasnya kita simak dengan sebaik-baiknya. Dan, yang pasti, itu harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersifat holistik, mengingat bahwa pemanfaatan warisan budaya itu mempunyai tiga kepentingan, yakni kepentingan ideologi, kepentingan edukasi, dan kepentingan ekonomi.

Daftar Bacaan

- Darmiyati, Tri. 2011. *Pengaruh Globalisasi terhadap Nilai-nilai Nasionalisme*. <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=7124>.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Budi Pekerti dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya.
- Permatasari, Iriani. 2011. *Pengaruh Globalisasi terhadap Nilai-nilai Nasionalisme*. <http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=8&jd=Pengaruh+Globalisasi+T+erhadap+Nilai-Nilai+Nasionalisme&dn=20090607183541>.
- Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya. (1994/1995). *Pembinaan Budaya dalam Lingkungan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud.
- Ridwan, Nurma Ali. 2011. *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*. <http://ibda.files.wordpress.com/2008/04/2-landasan-keilmuan-kearifan-lokal.pdf>.
- Sayuti, Suminto A. 2011. *Menuju Situasi Sadar Budaya: Antara "Yang Lain" dan Kearifan Lokal*. <http://www.semipalar.net/artikel/artikel34.html>.
- Siyamta, Yohanes. 1996. "Budi Pekerti di Tengah Arus Globalisasi" dalam *Pendidikan Budi Pekerti dalam Kurikulum Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa Jawa*. Yogyakarta: FPBS IKIP Yogyakarta.
- Subadra, I Nengah. 2008. *"Local Genius" vs "Local Genuine"*. <http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2008/5/9/o3.htm>.
- Sumaryadi. 2010. *Terjajah Secara Budaya* (Jendela Pewara Dinamika UNY, September 2010).
- Tranggono, Indra. Desember 2003. "Yang Lokal Digerus yang Global" dalam *Jurnal Kebudayaan Selarong* Vol. 2 – Desember 2003. Yogyakarta: Dewan Kebudayaan Bantul.
- Wirawan, Kadek Muriadi. 2011. *Proteksi "Local Genius" Melalui Pendidikan*. <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/5/8/o1.htm>.